Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpula'n

1. Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu Hakim selalu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan panjatuhan pidana, sesuai dengan aturan hukum yang mengatur hal tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim diwajibkan untuk memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya sebaagaimana dibuktiikan oleh keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan *visum et repertum* dan pengakuan terdakwa. Hakim mempertimbangkan dampak kekerasan terhadap korban dan keberlangsungan rumah tangga, namun juga menilai sikap terdakwa yang mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan. Penjatuhan hukuman harus adil dan sesuai dengan keadilan. Analisis terhadap putusan hakim Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh menunjukkan ketidakadilan karena tidak sesuai dengan konsep keadilan Aristoteles. Terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun 6 bulan, padahal melakukan kekerasan terhadap korban berulang kali. Hakim seharusnya memberikan hukuman tambahan kepada terdakwa, seperti hukuman absorbsi dan kumulasi terbatas. Hukuman absorbsi adalah memberikan penambahan hukuman terberat, sedangkan kumulasi

terbatas adalah menjatuhkan hukuman tambahan yang tidak melebihi hukuman terberat. Dengan demikian, putusan hakim harus lebih adil dan sesuai dengan keadilan. Bahwa dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor: 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa, penuntut umum, fakta-fakta dalam persidangan, seperti bukti dan kesaksian, terpenuhinya unsur-unsur sesuai pasal yang didakwakan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga dinyatakan bersalah.

B. Saran

1. Mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap perlindungan korban KDRT perlu lebih aktif meningkatkan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat.
2. Agar perempuan tidak terus menjadi kelompok yang banyak mengalami kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan perkawinan. Selain itu, korban KDRT perlu didorong untuk lebih berani menceritakan dan melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwenang. Kekerasan dalam rumah tangga juga sebaiknya tidak lagi dipandang sebaagai aib keluarga yang harus disembunyikan, melainkan sebaagai persoalan hukum yang perlu ditangani secaranya serius.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri